



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 027/Kep.666.DinKes/2011

TENTANG

STANDARISASI HARGA TERTINGGI HONORARIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor :027/6617 Dinkes tanggal 23 Agustus 2011 perihal Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa standarisasi harga tertinggi satuan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 027/Kep. 833-Bag.Um.Pal/2010 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun demikian Keputusan Walikota Bandung termaksud belum mencantumkan Standarisasi Harga Tertinggi Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Standarisasi Harga Tertinggi Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Tahun 2009-2013;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Harga Tertinggi Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Standarisasi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standarisasi harga tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2011
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.666.DinKes/2011

TANGGAL : 24 Agustus 2011

STANDARISASI HARGA TERTINGGI HONORARIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

URAIAN	SATUAN	BIAYA
Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan di Puskesmas	Peserta/Bulan	Rp. 250,-
Pengelola Administrasi Asuransi Kesehatan	Orang/Bulan	Rp. 100.000,-
Pelayanan Kasus Umum	Per Kunjungan	Rp. 1.500,-
Pelayanan Kasus Spesialistik	Per Kunjungan	Rp. 4.000,-
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Per Kunjungan	Rp. 2.000,-
Pelayanan Laboratorium	Per Kunjungan	Rp. 2.000,-
Pelayanan Pemeriksaan USG/Rontgen/EKG	Per Kunjungan	Rp. 4.000,-
Pelayanan Persalinan Normal	Per Orang	Rp. 50.000,-
Pelayanan Tugas Jaga Medis di luar jam kerja/hari libur/hari besar	Orang/Jam	Rp. 25.000,-
Pelayanan Tugas Jaga Non Medis di luar jam kerja/hari libur/hari besar	Orang/Jam	Rp. 10.000,-
Petugas Fogging PNS/Non PNS	Per Focus	Rp. 50.000,-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007